

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik mengenai hutan adat masih menjadi permasalahan di Papua hingga saat ini. Data yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2017-2019 mencatat terdapat 16 kasus konflik mengenai agraria yang ada di Papua (Pers, 2019). Konflik ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti, dibukanya lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, kebijakan otonomi khusus dan tata kelola hutan yang kacau, serta perusahaan yang tidak memberikan hak yang mereka janjikan kepada masyarakat. Jumlah deforestasi hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan masih banyak lainnya semakin bertambah. Berdasarkan data dari VOA Indonesia, terdapat 435.223 hektare hutan Papua telah dibabat oleh produsen minyak sawit, sepanjang tahun 2011-2019 (Litha, 2021).

Suku Awyu adalah salah satu dari banyak suku di Papua, tepatnya mereka berada di Provinsi Papua Selatan (Sorowat, 2023). Mereka adalah salah satu suku yang berupaya untuk melindungi hutan adat yang mereka miliki dari korporasi yang ingin dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Suku Awyu berusaha melindungi hutan adat mereka karena daerah tersebut menjadi sumber kelangsungan hidup suku Awyu untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti, mencari kayu bakar, berburu, hingga menjadi tempat mereka untuk mencari obat-obatan alami.

Kasus ini dimulai dengan berita tentang rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di tanah ulyat suku Awyu tepatnya berada di Distrik Fofi, kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Barat, diketahui oleh masyarakat setempat pada tahun 2022, dimana akan menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar melalui proyek Tanah Merah, yang dilakukan oleh perusahaan berikut, PT Megakarya Jaya Raya (MJR), PT Kartika Cipta Pratama (KCP), PT Indo Asiana Lestari (IAL), PT Nabati Usaha Mandiri (NUM), PT Graha Kencana Mulia (GKM), PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM), dan PT Trimegah Karya Utama (TKU), namun tidak adanya informasi yang jelas mengenai bagaimana proyek tersebut dan bagaimana perusahaan tersebut bisa mendapat izin dari Pemprov Papua. Karena tidak kunjung

mendapatkan keterangan Hendrikus Woro mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret 2023 (Kurniati, 2023).

Keputusan Dari KLHK mengenai regulasi dan pengaturan izin pengalihan hutan, yang melarang perusahaan untuk menebang hutan demi kegiatan perkebunan kelapa sawit, dipertanyakan oleh PT MJR dan PT KCP mereka yang diajukan di PTUN pada tanggal 15 Maret. Kemudian enam masyarakat adat suku Awyu, salah satunya adalah Gregorius Yame dan Barbar Murki, mengajukan diri sebagai tergugat intervensi PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya (MRJ) di PTUN Jakarta pada 9 Mei 2023 (Kurniati, 2023).

Pada Kamis, 6 Juli 2023, Pengadilan PTUN Jayapura menggelar persidangan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), sebuah perusahaan kelapa sawit. Persidangan tersebut menampilkan lima puluh dokumen sebagai bukti. Setelah PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan PT KCP dan PT MJR terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 5 September 2023, 65.415 hektar hutan hujan berhasil terlindungi. Pada 1 November 2023, PTUN Jayapura menolak gugatan yang diajukan komunitas adat Awyu, dengan memutuskan bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa yang bisa diselesaikan oleh pengadilan, serta tidak akan memeriksa rincian rekomendasi kesesuaian lingkungan atau penilaian Amdal (Adimaja, 2023).

Konflik lingkungan hidup merupakan realitas dalam pemberitaan lingkungan yang memiliki nilai berita yang kuat. Dalam jurnalisme lingkungan mayoritas membahas mengenai konflik antara hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati atau kepentingan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau nasional, dengan menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga konflik sebagai nilai berita utama yang selalu menarik perhatian khalayak, selain itu nilai berita konflik banyak berkaitan dengan berita lainnya seperti human interest, significance, proximity dan impact (Sudiby, 2014).

Kasus perampasan hutan adat Awyu dianggap sebagai kasus konflik lingkungan karena berhubungan dengan investasi perusahaan yang ingin merampas ruang hutan adat. Hal ini mengakibatkan komunitas adat Awyu berjuang untuk menjamin hak atas tanah adat mereka dan melindungi lingkungan hidup. Peristiwa ini menciptakan konflik antara komunitas adat dan perusahaan, yang sering terjadi

di Indonesia. Pada tahun 2023, Masyarakat Adat Awyu berhasil mengalahkan gugatan perusahaan sawit yang ingin merampas wilayah adat mereka (Sudibyo, 2014).

Media memiliki tanggung jawab untuk mempublikasi masalah kontroversi tersebut, namun, media juga memiliki tugas utama yaitu menjadi *watchdog* atau pengawas yang bertujuan untuk mengontrol para pemegang kekuasaan agar tetap akuntabel, dimana media tidak hanya bertugas sebagai saluran saja, namun media juga bertugas untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari intervensi negara (Marijan, 2019). Konflik tanah adat sebagai realitas lingkungan tidak selalu menjadi prioritas pemberitaan media *online* nasional, hanya media nasional yang melihat peristiwa ini sebagai isu yang mendesak seperti media Kompas.com yang memberitakan kasus ini. Selain itu media daerah Jerat Papua yang memiliki kedekatan dengan peristiwa yang secara konsisten memberitakannya. Berdasarkan pengamatan awal penelitian mengenai media yang mengangkat konflik tanah adat ini diperoleh data berikut. Data kompilasi jumlah berita konflik suku adat Awyu sejak Maret 2023 hingga Juni 2024.

Tabel 1. 1 Kompilasi jumlah konflik suku adat Awyu Papua pada media Nasional dari Maret 2023 - Juni 2024

No	Media	Jumlah Berita
1	Kompas.com	10
2	Detik.com	0
3	CNN Indonesia	2

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 1. 2 Kompilasi jumlah berita konflik suku adat Awyu Papua pada media Lokal dari Maret 2023-Juni 2024

No	Media	Jumlah Berita
1	Papua Today	0
2	Radar Papua	0
3	Jerat Papua	12

Sumber: Olahan Peneliti

Setelah melakukan pengamatan awal dengan melakukan perbandingan tiga media baik media nasional dan daerah, maka ditemukan jika Kompas.com secara kuantitas memiliki jumlah publikasi berita Suku Adat Awyu Papua paling banyak di antara media nasional yang lain, dan media yang menjadi perbandingan adalah media detik.com dan CNN Indonesia. Sama halnya dengan Kompas.com, media Jerat Papua menurut penelitian awal adalah media daerah yang secara kuantitas memiliki jumlah publikasi paling banyak mengenai Kontroversi



Gambar 1. 2. Contoh berita Jerat Papua (Jeratpapua.org)

Berita diatas yang dirilis pada 13 Maret 2023. Bahwasannya suku Awyu mengajukan gugatan kepada PTSP Provinsi Papua mengenai lingkungan hidup yang dikeluarkan kepada perusahaan perkebunan sawit PT IAL. Gugatan ini dilakukan karena pemerintah daerah menutup informasi kepada masyarakat.

Dari contoh berita di atas, secara sekilas sudah dapat dilihat bagaimana pembedaan berita dan cara penyajian berita. Antara media nasional yang fokus membahas alasan penggugatan dan media daerah yang fokus membahas bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan masyarakat Awyu selama ini.

Media dapat memberikan informasi yang menggambarkan situasi nyata. Namun, informasi yang diberikan oleh media kepada pembaca tidak selalu sesuai dengan situasi sebenarnya. Media sering mengubah, memperluas, dan menampilkan informasi sehingga berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Selama proses pembentukan suatu peristiwa, media massa memainkan peran penting dalam menciptakan keadaan sosiologis. Analisis framing biasanya digunakan untuk menentukan bagaimana media mempresentasikan peristiwa dengan menekankan detail-detail tertentu sambil mengabaikan yang lain. Melalui praktiknya, hampir semua media akan menyampaikan masalah menonjolkan aspek berbeda sambil menyembunyikan dan membuang aspek lain dari masalah tersebut (Eriyanto 2015).

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti mengaplikasikan analisis framing dalam mengidentifikasi media mengkonstruksi peristiwa dan menggunakan media massa sebagai acuan untuk menganalisisnya, sehingga dapat dibuat pembentukan tentang peristiwa tersebut. Dalam pembentukan ini, peneliti menggunakan framing Robert N. Entman, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yang digunakan jurnalis untuk mendefinisikan masalah, memperkirakan masalah,

menyimpulkan nilai moral, dan menekankan penelitian dari sebuah peristiwa (Eriyanto 2015).

Penelitian ini turut memanfaatkan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan. Pertama, menggunakan penelitian yang ditulis oleh Della Alfina Pratita pada tahun 2018 yang berjudul “Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulyat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat.” Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus Miles, Huberman dan Saldana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat AKUR mengkomunikasikan konflik saat menghadapi perebutan tanah ulyat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kesimpulan dalam media ini akar dari konflik yang terjadi adalah perdebatan interpretasi warisan terhadap Jaka Rumantaka dan masyarakat AKUR (Pratita, 2018).

Penelitian kedua ditulis oleh Al Fauzi Rahmat pada tahun 2021 dengan judul Pembingkai Berita Tentang Hutan NTB. Tujuan riset ini adalah untuk melihat pembingkai jurnalis, serta media berita dalam menerapkan konsep Entman. Kesimpulan dalam penelitian ini media yang digunakan memperlihatkan adanya narasi-narasi yang saling berhubungan dalam berbagai artikel mengenai permasalahan hutan NTB (Rahmat A.-F. , 2021).

Kemudian penelitian terdahulu terakhir ditulis oleh Muhammad Bahy Rakha pada tahun 2022 berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media *Online* Vice ID dan Detik.com)” Tujuan dari riset ini untuk mengetahui pembingkai yang dilakukan oleh Vice ID dan Detik.com dalam konflik agraria desa Wadas. Penelitian ini mengaplikasikan analisis kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan metode Framing Entman. Kesimpulan dari penelitian ini media Detik.com lebih condong membela pemerintah, dan Vice ID membela warga (Rakha, 2022).

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu sebagai tinjauan literatur yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini. Pada penelitian di atas terdapat persamaan terhadap isu konflik lingkungan, dan sama sama menggunakan konsep utama yang melihat objektivitas pada media *online*. Namun, penelitian ini membahas kasus yang berbeda dalam konteks Papua yang sering mendapat ketidak

adilan yang masih sering terjadi, dan penelitian ini ingin melihat kecenderungan keberpihakan media, karena pada penelitian sebelumnya media nasional seperti Detik.com berpihak ke pemerintah, sementara media baru seperti Vice ID memihak kepada orang banyak atau masyarakat, dalam kasus ini ingin melihat bagaimana media nasional dan media lokal bagaimana pengerjaannya, sementara dari dua penelitian terdahulu dengan menggunakan satu media, tetapi penelitian ini akan menggunakan dua media, yaitu nasional dan lokal, yang memiliki latar belakang kepemilikan yang berbeda, penelitian ini juga membahas mengenai kasus konflik hutan adat Papua, dimana masyarakat Papua memiliki kedekatan dengan hutan adat mereka, yang dianggap sebagai Ibu (Opu, 2021), dan penelitian ini mengaplikasikan model framing Robert N. Entman yang memiliki empat alat ukur.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini mengambil judul “Pembingkaihan Pemberitaan Konflik Tanah Adat Awyu Papua Pada Media Berita *Online* (Analisis Framing Robert N. Entman pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024)”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pembingkaihan konflik tanah adat Awyu Papua dalam berita Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkaihan konflik tanah adat Awyu Papua pada media berita Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan memberikan manfaat. Ada dua kategori manfaat yang diharapkan dari studi ini:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan memperkaya studi komunikasi di bidang jurnalistik lingkungan menggunakan analisis framing.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif mengenai kecenderungan media nasional dan lokal dalam mengangkat isu lingkungan pada masyarakat marginal.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini menjadi wacana, khususnya pekerja media berita terhadap komparasi bingkai media nasional dan daerah dalam pemberitaan konflik lingkungan hidup.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai keberpihakan media pada isu lingkungan di kalangan masyarakat adat.